

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dari pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Erlina, 2008:18). Laporan keuangan pemerintah bermanfaat memberikan informasi bagi *stakeholder* yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai serta pemakai mempercayai informasi tersebut. Informasi keuangan harus bermanfaat bagi pemakai sama seperti informasi tersebut harus mempunyai nilai (Suwarjono, 2014).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah yaitu menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan yang harus dipenuhi agar mempunyai informasi yang bermanfaat menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menyusun SAP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP

berbasis kas menuju akrual sebagai masa transisi menuju akuntansi berbasis akrual penuh yang kemudian digantikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Penerapan SAP berbasis akrual (Ramanda, 2015) adalah untuk memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya, terutama untuk informasi piutang dan utang pemerintah. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan. Akuntansi basis akrual diyakini juga dapat memberikan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Informasi keuangan yang dihasilkan dari basis akrual dapat mengurangi kesempatan atas kecurangan dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja, serta mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar teknis akuntansi, yaitu bagaimana transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*) dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada.

SAP tidak mengakibatkan pengaruh terhadap baik buruknya pelaporan keuangan atau kualitas laporan (Nurlaila & Rahmawati, 2016), sebaliknya Gusrya & Fadli (2017) membuktikan bahwa SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian dari perusahaan atau pemerintah atau sering disebut Standar pengendalian intern (SPI), sangat berperan penting dalam mewujudkan visi misi perusahaan. SPI memberikan pengaruh terhadap baik buruknya laporan keuangan atau kualitas dalam pemerintah (Mardiguna & Gayantri, 2018) hasil ini sama dengan Tantriani (2017). Sedangkan Lilis (2016) menyatakan SPI tidak mengakibatkan pengaruh terhadap baik buruknya suatu laporan tahunan keuangan atau kualitas.

Faktor selanjutnya yang dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah adalah SPI. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 tentang SPIP disebutkan bahwa SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data dari BPK permasalahan masih di dominiasi oleh lemahnya SPI pada pemerintah pusat atau daerah. Masih begitu banyak ditemukan ketidakpatuhan karyawan atau manajer dalam SPI yang ada pada perusahaan atau pemerintah daerah. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan daerah yang masih sangat kurang, hal ini menjadikan kualitas laporan keuangan juga menurun serta dapat juga memberikan dampak pada keandalan dan ketepatan waktu terhadap laporan keuangan. Masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada saat auditor dan BPK memeriksa sebuah laporan keuangan sebuah perusahaan atau pada pemerintah daerah (Atmaja & Probohudono, 2015).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga tidak terlepas dari pengaruh sumber daya manusia (SDM). Kompetensi SDM yang memadai sebagai pengelola keuangan tentunya akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Dalam hal ini adanya kompetensi SDM mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya dan memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Sumber daya yang berkompeten yang didukung dengan latar belakang oleh pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Tingkat pendidikan sering kali menjadi tolak ukur seseorang semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitasnya. Seseorang akan lebih mudah melaksanakan tugasnya dengan tingkat pendidikan yang memadai, pengalaman didalam suatu organisasi pun menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Dengan begitu seseorang akan semakin memahami tentang tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti SPI, Kompetensi SDM dan Penerapan SAP dengan judul skripsi **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Palembang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah SPI mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Palembang?
2. Apakah kompetensi SDM mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Palembang?
3. Apakah penerapan SAP mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Palembang?
4. Apakah SPI, Kompetensi SDM dan Penerapan SAP mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Palembang?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penelitian penyusunan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu variabel penelitian pada pengaruh SPI, kompetensi SDM, penerapan SAP dan kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Daerah Kota Palembang pada bulan Maret-Juli 2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh SPI terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh SAP terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota Palembang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh SPI, kompetensi SDM dan penerapan SAP terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa memberikan manfaat, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menginformasikan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Palembang, diantaranya ketiga faktor yang diteliti penulis yaitu pengaruh SPI, kompetensi SDM dan penerapan SAP supaya pemerintah bisa lebih fokus terhadap faktor yang mempengaruhi tersebut untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.
2. Penelitian ini diharapkan bisa mempunyai dampak yang baik untuk pihak-pihak yang terkait agar bisa menerapkan pengaruh SPI dengan baik dan benar, kompetensi SDM dengan baik dan benar, dan penerapan SAP dengan baik untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.